

**DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020**

***THE IMPACT OF COVID-19 ON BATAM CITY GOVERNMENT
REGIONAL REVENUE OF 2020***

**Rahmayandi Mulda¹, Nurhayati², Meri Enita Puspita Sari³, Ronal Parlindungan⁴,
Muhammad Solihin⁵**

¹Universitas Riau Kepulauan Batam
email: muldarahmayandi@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan Batam
email: nurhayati@gmail.com

³Universitas Riau Kepulauan Batam
email: merienita@gmail.com

⁴Universitas Riau Kepulauan Batam
email: ronald@gmail.com

⁵Universitas Riau Kepulauan Batam
email: solihin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Hal ini diduga berdampak pada pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam mengalami penurunan signifikan akibat dampak negatif COVID-19, terutama dari sektor pariwisata yang merupakan sumber utama pendapatan daerah. Namun, sektor Dana Perimbangan tidak terpengaruh dan justru mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan pendapatan lainnya juga meningkat karena stabilitas sektor industri perdagangan selama pandemi. Secara keseluruhan, dampak COVID-19 terhadap pendapatan daerah Kota Batam pada tahun 2020 tidak terlalu buruk karena APBD terus meningkat dari tahun 2019. Pemerintah Kota Batam mengambil langkah-langkah kebijakan, seperti menyalurkan program pembangunan dengan pemerintah pusat, menjual potensi daerah kepada pemerintah pusat dan investor, dan meningkatkan mutu layanan publik. Tindakan ini mendukung alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat. Saran penelitian meliputi fokus pada pengembangan program pembangunan inovatif, pemulihan sektor pariwisata, diversifikasi sumber pendapatan, dan peningkatan kerja sama antar pemerintah.

Kata Kunci: COVID-19; Pendapatan Daerah; Pemerintah Daerah .

Abstract

This research is motivated by the ongoing COVID-19 pandemic, which has resulted in a decline in both national and regional economic growth rates. It is suspected that this has had repercussions on the revenue of the City Government of Batam. The primary objectives of this study are to analyze the impact of COVID-19 on the city's revenue and to assess the policies implemented by the City Government of Batam to enhance revenue during the COVID-19 pandemic. The research employs a qualitative methodology, involving data collection through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate a significant reduction in Batam City's Local Own Source Revenue (PAD) due to the adverse effects of COVID-19, particularly within the tourism sector, which serves as a primary source of regional income. In contrast, the intergovernmental transfer sector remained unaffected and even experienced an increase in revenue. Additionally, other revenue sources witnessed growth due to the stability of the trade and industry sectors during the pandemic. Overall, the impact of COVID-19 on Batam City's revenue in 2020 was not excessively detrimental, as the Regional Budget (APBD) continued to increase from 2019. The City Government of Batam implemented various policy measures, such as aligning development programs with the central government, promoting the region's potential to both the central government and investors, and enhancing the quality of public services. These actions facilitated the allocation of additional funds from the central government. Research recommendations encompass a focus on the development of innovative development programs, the recovery of the tourism sector, the diversification of income sources, and the enhancement of inter-governmental collaboration.

Keywords: COVID-19; Local Government Revenue; Local Government.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi secara global, (Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. 2020) dengan prediksi negatif dari lembaga riset terkemuka. JP Morgan mencatat pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 turun hingga -1,1%, sementara IMF memproyeksikan penurunan ekonomi global sebesar 3% (Syamsuddin, 2021). Di Indonesia, pada Triwulan II-2020, pertumbuhan ekonomi mencapai -5,32%, menunjukkan perlambatan dari pertumbuhan 2,97% pada Triwulan I-2020 (Wuryandani, 2020).

Pandemi COVID-19, menurut beberapa penelitian (Hanoatubun 2020, Yamali & Putri 2020, Syamsuddin 2021), berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Dampaknya mencakup: pertama, lebih dari 1,5 juta pekerja mengalami

pemutusan hubungan kerja, dengan 90% di antaranya dirumahkan dan 10% terkena PHK. Dari jumlah itu, 1,24 juta orang pekerja formal, dan 265 ribu orang pekerja informal.

Kedua, menurut Kementerian Keuangan, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi signifikan, turun dari 49% pada Agustus 2019 menjadi 45,3% pada Maret 2020. Penurunan ini mencerminkan kinerja industri pengolahan, termasuk produksi, permintaan baru, dan ketenagakerjaan.

Dari sektor impor, pada triwulan I 2020 kinerja impor turun 3,7% *year-to-date* (ytd). Dari sector pariwisata terjadi penurunan kunjungan turis asing dan domestik sebesar 6.800 perhari. Okupansi hotel di Indonesia pada saat pandemi mencapai 50% pada 6.000

hotel, yang berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah.

Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada pendapatan asli daerah dan perekonomian daerah. Sektor pariwisata lumpuh, dan UMKM tidak dapat beroperasi karena permintaan menurun. Hal ini juga melemahkan sektor perdagangan, sejalan dengan penurunan target dan realisasi penerimaan pajak, terutama dari sektor hotel dan restoran (Paramitha 2021, Suliswanto 2020, Syamsuddin 2021).

Banyak penelitian telah mengungkapkan dampak signifikan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 pada keuangan daerah. Studi-studi ini mencatat penurunan pendapatan daerah akibat penurunan aktivitas ekonomi (Nasution et al. 2020) dan peningkatan belanja kesehatan (Cutler & Summers 2020, Claxton et al. 2021, Sood & Muray 2020). Selain itu, perubahan dalam pola pengeluaran publik juga telah diamati. Sebagai respons terhadap krisis, banyak pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah kebijakan, seperti pengurangan belanja dan gaji (Maher et al., 2020) serta pengalihan sejumlah pos anggaran pada sektor tertentu (Sanjaya 2020). Berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak pandemi COVID-19 pada pendapatan Pemerintah Kota Batam dan menganalisis strategi-strategi yang diadopsi oleh pemerintah

daerah. Pertanyaan penelitian meliputi sejauh mana dampaknya pada pendapatan daerah, apakah ada dampak finansial signifikan pada pemerintah Kota Batam, dan strategi apa yang digunakan oleh Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi dampak negatifnya.

KAJIAN LITERATUR

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, pendapatan daerah adalah seluruh uang yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak dapat dibayar kembali oleh daerah.

Komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut: pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau uang yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Dalam rangka mewujudkan potensi daerah secara maksimal sebagai wujud desentralisasi, PAD berupaya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Kedua, Dana Perimbangan, atau uang dari pendapatan APBN yang disalurkan ke daerah untuk

membayai kebutuhan daerah sebagai bagian dari proses desentralisasi. Ketiga Pendapatan daerah lain yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain sesuai dengan batasan peraturan perundang-undangan. Mencakup seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang diperoleh daerah dan berasal dari pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi terwujudnya otonomi daerah sesuai dengan kemampuan daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan dari, retribusi, pajak yang dipungut pemerintah daerah, penghasilan dari perusahaan milik daerah (BUMD) dan kekayaan lainnya yang dipisahkan oleh pemerintah daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana pendapatan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah dalam rangka pemberlakuan desentralisasi. Dana ini dikenal sebagai Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dan dana bagi hasil perpajakan. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan berupaya mencapai keseimbangan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Pemerintah Daerah.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah, kecuali pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, dianggap sebagai pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Ini termasuk hibah, uang darurat, dan pendapatan lainnya.

Menurut Yurianto (2019) bahwa pendapatan daerah yang semakin tinggi maka relevan dengan pengeluaran untuk pembangunan daerah. Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah berharap percepatan pembangunan daerah melalui pendapatan daerah atau dengan kata lain pemerintah berusaha untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk merealisasikan pembangunan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan perekonomian suatu daerah maka semakin tinggi pula kegiatan perekonomian masyarakat serta semakin sejahtera masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa terdapat korelasi antara pelemahan

sektor pariwisata dan pelemahan sektor perdagangan. Fenomena ini terutama terkait dengan dampak yang signifikan yang timbul akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Suliswanto (2020) menunjukkan bahwa sektor pariwisata mengalami penurunan performa yang cukup mencolok. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan dan penerapan pembatasan perjalanan di berbagai negara. Dampak negatif ini juga merembet ke sektor perdagangan, mengingat penurunan mobilitas manusia dan barang berdampak pada aktivitas perdagangan internasional dan volume ekspor-impor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelemahan sektor pariwisata berdampak secara serupa pada sektor perdagangan, sebagai konsekuensi dari tantangan ekonomi yang muncul akibat pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang merugikan terhadap pencapaian target dan realisasi pendapatan pajak. Salah satu sektor yang sangat terdampak adalah industri hotel dan restoran (Syamsudin 2021).

Penurunan jumlah wisatawan dan pembatasan operasional yang diberlakukan dalam upaya mengendalikan penyebaran virus telah mengakibatkan penurunan drastis dalam penerimaan hotel dan restoran. Dalam konteks ini, hotel dan restoran biasanya dikenakan pajak tertentu atas pendapatan mereka. Akibat penurunan kunjungan dan pendapatan,

penerimaan pajak dari sektor ini menurun secara signifikan, yang berdampak pada target penerimaan pajak secara keseluruhan.

Pandemi ini juga mempengaruhi perilaku konsumen, yang cenderung mengurangi kunjungan ke hotel dan restoran karena ketidakpastian yang berkaitan dengan penyebaran virus. Ini mengakibatkan penurunan permintaan dalam sektor ini, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh bisnis di sektor hotel dan restoran.

COVID-19 telah menyebabkan penurunan pendapatan pajak secara keseluruhan, terutama terkait dengan sektor hotel dan restoran, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Syamsuddin (2021). Hal ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak dan menjaga stabilitas fiskal di tengah pandemi.

Dampak virus corona terhadap perusahaan dan arus kas kepemilikan perusahaan menjadi berkurang karena adanya pandemic COVID-19 ini di perekonomian Indonesia. Sepanjang Januari 2020, terjadi penurunan ekspor Impor dari dan ke China berkurang cukup drastis. Peningkatan kasus positif yang terjadi dari hari ke hari menyebabkan banyak kerugian terhadap berbagai sektor di Indonesia. Salah satu nya adalah sektor ekonomi Indonesia (Ramadhan et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada analisis Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batam tahun 2020 selama periode pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti memainkan peran utama sebagai instrumen penelitian. Pendekatan yang digunakan, yaitu kombinasi dari beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, analisis data, dan observasi lapangan (Sugiyono 2018).

Peneliti melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan dan stakeholder terkait seperti kepala Disperindak, Anggota Banggar DPRD, Wali Kota Batam, GM Pelabuhan Penumpang BP Batam, GM Pelabuhan Barang BP Batam dan lain-lain. Ini membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan dan tindakan konkret telah diambil selama pandemi untuk mengelola keuangan daerah.

Selain itu, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan seperti kondisi pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, bandara, perhotelan, tempat-tempat wisata dan kawasan industri Kota Batam terhadap fenomena yang terjadi selama pandemi COVID-19. Ini memberikan wawasan tambahan tentang dampak pandemi pada aktivitas ekonomi dan keuangan di wilayah tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah eksplorasi data statistik yakni melakukan analisis awal

untuk memahami karakteristik data. Hal ini melibatkan penggunaan grafik ekspor impor Kota Batam tahun 2020, kunjungan wisatawan, tabel pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun 2020, dan data statistik lainnya untuk mendukung penelitian ini.

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yakni melakukan pemetaan dari data-data kualitatif seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada responden, kemudian melakukan analisis dokumen dari berita media, jurnal, maupun laporan-laporan dari pemerintah daerah terkait Covid-19 maupun dokumen lainnya. Selain itu peneliti menganalisis hasil observasi lapangan untuk memastikan apakah ada keterkaitan antara data wawancara dan dokumentasi terkait dampak Covid-19 dengan pendapatan daerah kota Batam.

Tahapan akhir analisis data yakni penarikan kesimpulan tentang apakah pendapatan daerah mengalami penurunan atau kenaikan, faktor apa yang memengaruhi, dan apakah ada kebijakan atau tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah kota Batam.

HASIL PENELITIAN

Kota Batam adalah kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini yang menjadikan Kota Batam sebagai wilayah andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional ataupun

di wilayah provinsi Kepulauan Riau. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pertumbuhan ekonomi Batam ditargetkan akan mencapai 5,8% pada tahun 2020-2025. Hal ini terkait penetapan dua kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Kota Batam relevan dengan rencana integrasi kawasan FTZ (*Free Trade Zone*) Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang (BBKT).

Berdasarkan *masterplan* tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa tema besar pengembangan Batam adalah upaya transformasi kawasan tersebut menjadi hub logistik internasional guna mendukung perkembangan sektor industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang berdaya saing. Berikut adalah data kontributor terbesar pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam adalah pada sektor Industri pengolahan sebesar 54,13%, konstruksi sebesar 20,84%, dan perdagangan besar dan eceran sebesar 6,71% sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kota Batam (2021).

Kota Batam merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang memiliki pendapatan yang cukup besar di bandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, besarnya pendapatan daerah yang dimiliki kota Batam tidak terlepas dari wilayahnya yang sangat strategis, selain itu Kota Batam juga merupakan daerah industri, perdagangan dan pariwisata. Potensi ini sangat

strategis dalam mendorong dan meningkatkan pendapatan daerah kota Batam, namun sangat rentang dengan sistem dan pengaruh ekonomi secara global yang tidak stabil. Awal munculnya COVID-19 di tahun 2019 kemudian menyebar luas di berbagai negara-negara maju di tahun 2020 membuat ekonomi negara-negara maju tidak stabil dan mengalami kemunduran.

Batam memiliki sekitar 1.309 industri unggul baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan jumlah 169.000 pekerja dari hasil produksi migas dan non migas. Adapun kategori industri unggul untuk PMA yang telah dikembangkan di kota Batam mencakup: Logam dan Mesin 109, Kulit, Karet, Plastik, dan Kemasan 85, Elektronik dan Elektrika 77, Perkapalan dan Penunjang 66, Migas dan Penunjang 39 (Sumber Data: Website Resmi, BP Batam).

Kota Batam yang merupakan kota industri dan perdagangan serta pariwisata secara tidak langsung memiliki hubungan dan ketergantungan dengan industri dan perdagangan negara-negara maju tersebut, hal ini menarik perhatian karena Covid 19 berdampak secara global dan hampir semua negara terdampak secara ekonomi.

Berikut akan dijelaskan kondisi keuangan atau pendapatan pemerintah kota Batam di masa COVID-19 pada tahun 2020.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah karena dapat berpengaruh secara sistemik utamanya di sektor pembangunan. Fatimah et al. (2020) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik penerimaan pajak, retribusi, maupun dari hasil BUMD mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun 2019 sebelum adanya COVID-19. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai diangka Rp.1.147.685.950.193 dan memasuki COVID-19 di tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yakni diangka Rp.975.558.062.748.

Pemerintah Kota Batam sebelumnya melakukan prediksi bahwa Rencana penerimaan pendapatan APBD Batam 2020 didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 1.396.910.122.588. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp 46.398.133.902 atau naik 3,44 persen dibanding PAD tahun 2019.

Dampak Covid 19 pada tahun 2020 terhadap PAD Kota Batam menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Batam karena di tahun 2019 pemerintah kota Batam sudah menargetkan dan melakukan prediksi bahwa pendapatan pemerintah akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan

dari tahun-tahun sebelumnya, namun situasi dan kondisi COVID-19 target yang harusnya ingin dicapai oleh pemerintah kota hanya mengalami kenaikan yang tidak sesuai dengan target, seperti apa yang disampaikan oleh wali kota Batam menyatakan bahwa APBD Kota Batam, diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp Rp 82.657.299.227 Miliar, dari Rp 2,8 triliun pada 2019 menjadi Rp. 2.926.027.529.355 triliun pada 2020. “Penerimaan pendapatan dan pembiayaan APBD Batam 2020 ditargetkan naik 2,91 persen dibandingkan APBD 2019, dalam penyampaian Ranperda APBD beserta nota keuangan 2019 pada rapat paripurna, Rabu 16 Oktober 2019.

Menurunnya PAD Kota Batam pada masa Covid-19 pada tahun 2020 menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan di kedepannya karena hal ini dapat berdampak secara sistemik bagi program pembangunan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan mengalami peningkatan yaitu pada Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sedangkan di pada Dana Alokasi Umum justru mengalami penurunan yang cukup besar yakni di Tahun 2019 berada diangka Rp. 659.164.959.000 dan di tahun 2020 berada diangka Rp.629.854.829.000 sedangkan Dana Alokasi Khusus hanya mengalami sedikit penurunan yakni dari angka

Rp.131.171.919.474. tahun 2019 pada tahun 2020 menurun menjadi 131.171.919.474.

Selanjutnya dana perimbangan kota Batam tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 1.171.341.314.225 namun tidak mencapai target hanya berada diangka Rp.1.058.103.342.486. Dana perimbangan diproyeksi naik sebesar 1,95 persen dibanding tahun sebelumnya. tetapi hal tersebut pendapatan dana perimbangan tetap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, Sumber pendapatan dana perimbangan itu berasal dari bagi hasil sumber pajak, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pada Lain-lain Pendapatan yang Sah justru mengalami peningkatan pada tahun 2019 berada diangka Rp.97.309.475.047 dan pada tahun 2020 mencapai diangka Rp.169.226.557.955. Pada Lain-lain Pendapatan yang Sah pemasukan terbesar yakni Pendapatan Hibah pada tahun 2019 berada diangka Rp.97.309.475.047 dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yakni

diangka Rp.169.226.557.955 penyumbang kedua yakni di Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah yakni sebesar Rp.167.515.720.197 dan penyumbang ketiga yakni Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yakni sebesar Rp.205.376.250.601.

COVID-19 merupakan sesuatu hal diluar dari perediksi bahwa akan berdampak terhadap perekonomian di Indonesia ataupun khususnya di kota Batam. Diawal tahun 2020 COVID-19 sudah mulai masuk dan mulai mengganggu stabilitas perekonomian di Indonesia dan kota Batam, hal ini membuat banyak para pengusaha mengalami kendala dalam pembayaran pajak dan lain sebagainya hal ini sangat berdampak pada pendapatan kota Batam. Dampak Covid 19 terhadap pendapatan asli daerah kota Batam tahun 2020 jika dianalisis lebih mendalam menunjukkan penurunan di beberapa sektor utamanya di sektor pendapatan pajak, adanya peraturan dari kebijakan pemerintah terkait dengan penundaan pembayaran pajak. Data keuangan daerah Pemerintah Kota Batam pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Batam Menurut Jenis Pendapatan 2018-2020

Jenis Pendapatan	2018	2019	2020
1. Pendapatan Asli Daerah	1.084.640.559.852	1.147.685.950.193	975.558.062.748
a. Pajak Daerah	845.697.306.042	934.458.907.796	755.674.707.900
b. Retribusi Daerah	94.581.392.976	90.518.037.598	92.487.837.368
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.897.911.908	11.836.597.248	8.601.742.730

d. Lain-lain PAD yang Sah	130.463.948.926	110.872.407.549	118.793.774.749
2. Dana Perimbangan	897.475.587.149	955.858.409.492	1.058.103.342.486
e. Bagi Hasil Pajak	104.694.249.054	63.403.441.380	127.988.781.032
f. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	117.946.833.795	101.787.230.511	169.087.812.980
g. Dana Alokasi Umum	599.074.016.000	659.164.959.000	629.854.829.000
h. Dana Alokasi Khusus	75.760.488.300	131.502.778.601	131.171.919.474
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	95.830.182.753	97.309.475.047	169.226.557.955
i. Pendapatan Hibah	95.830.182.753	97.309.475.047	169.226.557.955
j. Dana Darurat	-	-	-
k. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	195.746.380.098	198.181.457.797	205.376.250.601
l. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	86.400.150.226	123.854.964.336	167.515.720.197
m. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
n. Lainnya	-	-	-
Jumlah	2.360.092.860.079	2.522.890.256.865	2.577.779.933.987

Sumber: BPS Batam Dalam Angka, 2021

Pada Tabel 1 terlihat beberapa hal yang perlu deskripsi yang lebih mendalam terkait realisasi pendapatan daerah. Dari beberapa komposisi pendapatan daerah mengalami penurunan namun berdasarkan akumulasi atau realisasi pendapatan daerah Kota Batam justru mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam yakni berada diangka Rp. 2.522.890.256.865, untuk ditahun 2020 mengalami kenaikan yakni diangka Rp. 2.577.779.933.987.

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sangat terdampak semenjak Terjadinya COVID-19. Hal ini diakibatkan melemahnya perekonomian kota Batam utamanya di sektor bidan jasa seperti

perhotelan dan perdagangan, banyak hotel yang tutup selama pandemi COVID-19 serta jalur penyeberangan Batam-Singapura yang merupakan salah satu penopang perekonomian kota Batam diberbagai sektor selama ini. Warga negara asing seperti masyarakat Singapura merupakan wisatawan terbanyak di kota Batam dari masa ke masa yang merupakan salah satu penggerak perekonomian yang ada kota Batam namun semenjak terjadinya COVID-19 hal tersebut membuat perekonomian kota Batam menjadi sangat lemah. Akibat dari hal tersebut penerimaan pajak menjadi sangat terdampak. Pencapaian realisasi atas pendapatan daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) APBD Kota Batam tahun 2020. Bahwa realisasi terkait Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2020 sebesar Rp2.577.504.994.815,32 triliun tidak mencapai target. Hanya, sebesar Rp77.442.613.932,95 miliar atau terealisasi sebesar 97,08 persen dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2020. Dalam laporan LKPD tahun 2020 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2.577.504.994.815,32 mengalami peningkatan sebesar Rp54,6 miliar lebih dibanding realisasi tahun 2019 untuk pendapatan tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif yakni 2,2 persen.

Dimasa pandemi COVID-19 tidak mengalami penurunan perolehan pendapatan Kota Batam. Artinya bahwa secara nominal pendapatan daerah meningkat dibanding tahun sebelum COVID-19 melanda. Namun jika dilihat dari segi pertumbuhannya mengalami penurunan, karena pada tahun 2019 pendapatan daerah tumbuh 6,9 persen namun di tahun 2020 hanya tumbuh 2,2 persen.

Dalam melihat kondisi dan mengukur ekonomi secara makro kota Batam dapat dilihat melalui dua sektor yakni industri perdagangan dan pariwisata serta turunannya seperti hotel, restoran, hiburan malam, travel dan lain-lain. Kedua sektor ini menjadi kunci roda perekonomian dan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, berikut akan diuraikan kedua sektor tersebut:

Industi dan Perdagangan

Bencana Pandemi Covid-19, telah melumpuhkan banyak industri perdagangan di dunia. Tidak hanya itu, bahkan industri konstruksi yang sebelumnya digalakkan oleh Pemerintah juga mengalami dampak yang sama (Triyawan dan Fendayanti, 2021).

Namun hal yang berbeda di Kota Batam disektor industri perdangan jika melihat data statistik menunjukkan bahwa nilai ekspor dari tahun 2020 tidak terlalu mengalami penurunan secara signifikan, karena produksi industri di beberapa kawasan industri tetap beroperasi hal ini dapat dilihat jumlah nilai barang ekspor masih dalam kondisi stabil. berikut adalah data nilai ekspor yang ada di kota Batam.

Tabel 2. Perbandingan Ekspor Di Sektor Industri Perdagangan Di Kota Batam Tahun 2018-2020.

Pelabuhan Bongkar Infor/Pelabuhan Muat Ekspor	Volume Ekspor Menurut Pelabuhan Utama (Ribuan Ton)		
	2018	2019	2020
Batu Ampar	897,4	1040,9	1169,0
Sekupang	303,3	459,3	274,6
Kabil/Panau	2008,5	2872,6	1631,2
Pulau Sambu	10,7	565,9	2671,3

Sumber: BPS Kota Batam 2020.

Dari data diatas empat pelabuhan bongkar muat barang di kota Batam ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan artinya dapat saling menutupi dari volume ekspor yang ada.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai impor non migas sebelum dan selama pandemi COVID-19, sedangkan ekspor total, ekspor migas,

ekspor non migas, impor total, dan impor migas mengalami perubahan atau perbedaan nilai secara signifikan pada periode sebelum dan selama pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia di masa krisis ini ternyata lebih kuat di sisi impor karena nilai impor non migas yang tidak menunjukkan perbedaan signifikan baik sebelum dan selama pandemi COVID-19 (Prasety et.al., 2022).

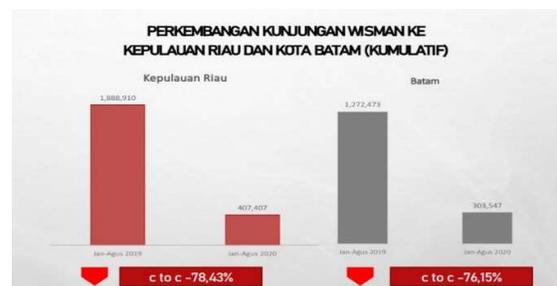
Melihat kondisi ekspor dan impor dimasa COVID-19 masih dalam keadaan stabil menjadi indikator utama bahwa industri manufaktur dan perdagangan di kota Batam tidak terdampak secara signifikan. artinya bahwa sumber pendapatan pemerintah daerah disektor industri perdagangan masih tetap aman.

Parawisata, Perhotelan dan Restoran

Diatas sudah dijelaskan bahwa disektor penerimaan asli daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan di beberapa sektor turunannya seperti penerimaan pajak dan penghasilan dari badan usaha daerah, yang paling terdampak pada sektor perpajakan adalah pajak perhotelan, hiburan, wisata, jasa dan lain sebagainya, karena kondisi pada saat COVID-19 hampir seluruh ekonomi masyarakat lumpuh seperti wisatawan dari negara tetangga baik Malaysia maupun Singapura sebagai salah satu penggerak utama perekonomian kota Batam tidak bisa masuk kewilayah Batam. Jumlah investasi perekonomian kota Batam berada diangka

diatas lima puluh persen, sehingga kota Batam sangat bergantung kondisi negara tetangga. Lumpuhnya negara tetangga dan kota Batam menjadi bencana tersendiri bagi kondisi ekonomi kota Batam sehingga berdampak pada pemasukan pajak pemerintah daerah secara tidak langsung.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Kota Batam sepanjang tahun 2020 sebanyak 306.777 kunjungan. Jumlah tersebut merosot sangat jauh dibandingkan periode tahun 2019 yang mencapai 1.947.934 kunjungan. Jika dibanding pada Desember 2019, kunjungan wisman Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 99,75 persen. Terkait dengan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di kota Batam baik disektor pendapatan retribusi atau pajak kepada pemerintah selain itu juga sangat berdampak pada UMKM, jasa travel dan perhotelan.



Gambar 1. Statistik Wisatawan Mancanegara Kepri Dan Batam 2019 dan 2020

Sumber: Kominfo.batam.go.id

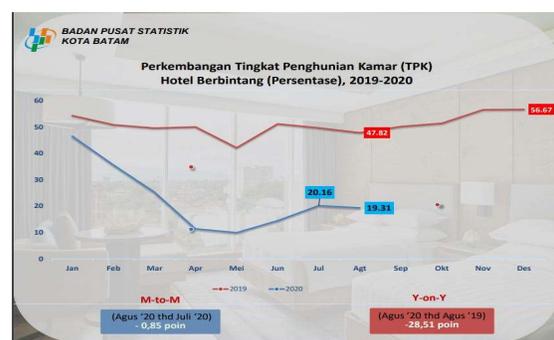
Sektor hunian hotel juga mengalami dampak yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari data pusat statistik menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2019 pada bulan Agustus mencapai 47.82 persen, sedangkan di tahun 2020 pada bulan yang sama (Agustus) hanya mencapai 19.31 persen, dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa penerimaan pemerintah dari sektor pajak ataupun retribusi lainnya di sektor perhotelan juga ikut terdampak. Disektor perhotelan jika dilihat dari gambar diatas sangat terdampak hal tersebut juga terdampak pada sektor turunannya seperti restoran, jasa travel, wisata, UMKM dan lain sebagainya karena disektor perhotelan merupakan bidang usaha yang tidak berdiri sendiri, apalagi umumnya rata-rata penghuni hotel adalah warga tetangga dari Singapura dan Malaysia.

Pajak Hotel maupun pajak restoran adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD, dan juga sebagai pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan efektifitas realisasi penerimaan pajak restoran terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan daerah (Atmaja S. 2020).

Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel serta pajak

restoran kepada PAD di kota Batam mengalami peningkatan di tahun 2017- 2019 tetapi di tahun 2019-2021 mengalami penurunan dikarenakan terjadinya masa pandemic COVID-19 sehingga kontribusi pajak hotel di tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat jauh (Anggraini & Janrosli 2023).

Berikut dijelaskan secara statistik melalui grafik terkait tingkat penurunan hunian hotel di kota Batam, dimulai sejak awal tahun 2020 pada bulan Januari hingga sampai September hunian hotel di Batam sangat merosot jauh kebawah, padahal kota Batam merupakan salah satu kota yang menempati posisi hunian hotel tertinggi di Indonesia setelah Jakarta dan ini merupakan salah satu pendapatan unggulan pemerintah kota Batam dalam hal pajak dan retribusi daerah.



Gambar 2. Tingkat Hunian Hotel di Kota Batam Tahun 2020

Sumber: BPS Kota Batam 2021

Dilihat dari hunian hotel yang ada di kota Batam yang mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi salah satu indikator bahwa kondisi ekonomi khususnya disektor perhotelan dan pariwisata mengalami kondisi

yang sangat memprihatinkan, ribuan pegawai hotel, travel dan tempat wisata yang ada di kota Batam terancam di PHK dan beberapa hotel besar seperti Harmoni yang beroperasi selama puluhan tahun tutup secara permanen.

Tabel 2. Realisasi Pajak Hotel Kota Batam Tahun 2018-2020

No.	Th.	Target	Realisasi
1	2018	107.147.368.332	108.854.974.662
2	2019	132.509.347.069	123.261.476.601
3	2020	65.041.777.000	44.398.892.403

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam 2021.

Pandemi COVID-19 telah memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan pemerintah daerah di kota Batam, seperti yang dijelaskan oleh berbagai sumber, termasuk APBD kota Batam, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Berikut akan diuraikan tentang dampak-dampak COVID-19 tahun 2020 terhadap penurunan Pendapatan Pajak dan retribusi daerah kota Batam.

Dimasa Pandemi mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi. Kota Batam merupakan salah satu daerah yang sangat terdampak. Penutupan bisnis, pembatasan pergerakan, dan penurunan konsumsi berdampak langsung pada pendapatan dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Banyak wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan. Ini mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dan denda pajak. Pemerintah daerah terpaksa

memberikan kelonggaran pajak kepada beberapa sektor untuk meringankan beban ekonomi mereka.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Dampak pandemi terhadap ekonomi lokal mengakibatkan penurunan pendapatan dari sektor perpajakan dan sektor non-pajak seperti hasil usaha daerah dan penerimaan lainnya. PAD mengalami penurunan yang signifikan.

Kota Batam yang sangat bergantung pada sektor pariwisata mengalami dampak ekonomi yang lebih besar. Penurunan kunjungan wisatawan dan pembatalan acara pariwisata mengakibatkan penurunan pendapatan dari sektor ini. Selain itu, pandemi juga dapat mengakibatkan keterlambatan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan, karena terbatasnya sumber daya dan keterbatasan anggaran

Penurunan pendapatan pajak adalah salah satu dampak yang paling nyata dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Penutupan bisnis, pembatasan pergerakan, dan penurunan konsumsi telah meredam aktivitas ekonomi di seluruh negeri, yang berdampak langsung pada pendapatan dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pendapatan pajak pusat dan pajak daerah mengalami penurunan yang signifikan selama periode pandemi.

Dampak penurunan pendapatan pajak ini mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor usaha kecil, menengah, dan besar. Banyak wajib pajak, baik perusahaan maupun individu, mengalami penurunan pendapatan atau kesulitan finansial sebagai akibat dari pandemi, yang mengakibatkan keterlambatan atau penurunan pembayaran pajak mereka.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan berbagai insentif fiskal dan kebijakan kelonggaran pajak untuk membantu meringankan beban ekonomi yang dialami oleh wajib pajak. Selain itu, upaya pengawasan dan penegakan pajak juga menjadi lebih ketat untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik.

Namun, penurunan pendapatan pajak tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan membiayai program-program sosial dan pembangunan infrastruktur. Hal ini juga menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah untuk tahun-tahun mendatang, karena dampak pandemi COVID-19 masih terus dirasakan dalam jangka panjang.

PEMBAHASAN

Sektor unggulan pendapatan pemerintah kota Batam adalah industri perdagangan dan pariwisata kedua sektor ini menjadi penggerak ekonomi kota Batam secara umum. melalui

pembahasan ini akan dijabarkan kedua sektor tersebut terhadap dampak COVID-19. Jika kedua sektor ini terdampak secara otomatis sangat berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah kota Batam.

Dalam berbagai literatur Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap industri dan perdagangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 ini sangat kompleks dan beragam, tergantung pada sektor ekonomi dan lokasi geografis. Pemerintah dan bisnis di seluruh dunia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak negatif ini, termasuk stimulus ekonomi, restrukturisasi bisnis, dan perubahan strategi pemasaran. Meskipun ada tantangan besar, beberapa sektor juga telah menemukan peluang baru selama pandemi ini, seperti perusahaan teknologi yang mendukung kerja jarak jauh dan belanja online.

Disektor industri perdagangan Kota Batam tidak terlalu terdampak hal ini dibuktikan dengan volume dan nilai ekspor impor yang ada di kota Batam masih dalam level aman dan stabil.

Pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disektor ekspor impor cukup besar. Pemerintah daerah biasanya tidak mengenakan pajak langsung terhadap kegiatan ekspor dan impor. Pajak yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor umumnya dikenakan oleh pemerintah pusat, yaitu Pemerintah Indonesia. Beberapa jenis pajak

yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor di Indonesia juga menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah kota Batam meliputi, Bea cukai adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor ke Indonesia. Pajak ini biasanya dibayar oleh importir atau eksportir ketika barang tiba di pelabuhan atau bandar udara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada barang dan jasa yang beredar di dalam negeri, termasuk barang-barang yang diimpor. PPN yang dibayar oleh importir akan diperoleh oleh pemerintah pusat. Pajak Penghasilan dapat dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekspor dan impor. Bagian dari pajak ini juga akan masuk ke kas negara.

Bea Masuk adalah pajak tambahan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang diimpor ke Indonesia. Pajak ini berlaku untuk barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan masyarakat. Pajak ekspor dikenakan pada beberapa jenis barang ekspor tertentu, meskipun tarifnya biasanya lebih rendah daripada bea masuk untuk barang impor.

Pendapatan atau pajak yang terkandung dalam kegiatan ekspor impor merupakan kewenangan langsung pemerintah pusat namun pemerintah daerah mendapat dana bagi hasil pajak dari kegiatan ekspor impor tersebut, jika dilihat dalam struktur pendapatan APBD kota Batam pada tahun 2020 pendapatan yang

terbanyak adalah dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Jika dilihat lebih dalam lagi jenis pendapatan yakni pendapatan dana bagi hasil pajak baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dana alokasi umum.

Pajak disektor industri perdagangan inilah yang menjadi penyumbang terbesar pemasukan pemerintah daerah melalui dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah baik ada masa COVID-19 maupun sebelum COVID-19. Pemasukan daerah yang bersumber dari PAD di masa COVID-19 turun drastis karena sektor unggulan, seperti pariwisata dan turunannya sangat terdampak.

Dampak COVID-19 terhadap pariwisata sangat signifikan. Dampak tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pendapatan pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa dampak utama COVID-19 pada sektor pariwisata dan pendapatan pemerintah daerah.

Penurunan Kunjungan Wisatawan, Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata. Banyak negara mengambil langkah-langkah pembatasan perjalanan, termasuk pembatasan internasional dan lock down yang membatasi mobilitas orang. Hal ini mengakibatkan pengurangan tajam dalam pendapatan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, agen perjalanan, dan atraksi wisata.

Kerugian Bisnis Pariwisata seperti Hotel, restoran, toko souvenir, dan berbagai bisnis terkait pariwisata lainnya menghadapi penurunan drastis dalam pendapatan mereka. Banyak dari mereka terpaksa mengurangi operasional mereka atau bahkan berhenti beroperasi sementara waktu. Hal ini berdampak pada hilangnya pekerjaan dan pendapatan bagi pekerja di sektor pariwisata.

Pemerintah daerah sering mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata melalui berbagai cara, termasuk pajak, retribusi, dan pajak daerah lainnya. Penurunan aktivitas pariwisata mengakibatkan penurunan pendapatan daerah dari sumber-sumber ini. Pajak yang biasanya dikenakan pada akomodasi, restoran, dan transportasi juga mengalami penurunan signifikan.

Sektor pariwisata melibatkan beberapa jenis pajak yang dapat memberikan pendapatan kepada pemerintah kota Batam, maupun pemerintah pusat. Berikut adalah beberapa jenis pajak yang umumnya terkait dengan sektor pariwisata dan turunannya.

Pajak Hotel (Hotel Tax), Pajak hotel dikenakan pada penginapan dan akomodasi, termasuk hotel, motel, penginapan liburan, dan apartemen yang disewakan secara harian atau mingguan. Pajak Restoran dikenakan pada penjualan makanan dan minuman di restoran, kafe, bar, dan tempat makan sejenis.

Pajak Hiburan (Entertainment Tax), Pajak hiburan dapat dikenakan pada tiket

pertunjukan, konser, bioskop, acara olahraga, dan kegiatan hiburan lainnya. Pajak parkir (Parking Tax), dikenakan pada fasilitas parkir umum, seperti parkir di pusat perbelanjaan, bandara, atau tempat wisata. Pajak transportasi dapat dikenakan pada tiket pesawat, kereta api, bus, atau taksi. Selain itu, pajak juga bisa dikenakan pada penyewaan kendaraan seperti mobil dan sepeda. Pajak bahan bakar biasanya dikenakan pada bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan oleh wisatawan, seperti bensin dan diesel.

Beberapa negara atau daerah menerapkan pajak khusus untuk mendukung promosi pariwisata dan pengembangan infrastruktur pariwisata seperti Pajak penerbangan dikenakan pada tiket pesawat untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan bandara. Beberapa hotel mengenakan biaya tambahan yang disebut "*resort fee*" untuk memberikan akses ke fasilitas dan layanan tambahan di hotel, seperti kolam renang, gym, atau layanan *shuttle*.

Terdampaknya sektor pariwisata menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) baik penerimaan pajak maupun retribusi daerah dalam APBD kota Batam sangat terlihat jelas terjadi penurunan.

Perbandingan pendapatan tahun 2019 dengan tahun 2020 sebenarnya mengalami peningkatan tetapi yang menjadi masalah adalah pencapaian target pendapatan daerah. Pencapaian pendapatan daerah kota Batam

pada tahun 2020 tidak sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah daerah hal ini menyisakan masalah karena program pembangunan yang sudah direncanakan menjadi terdampak atau realisasinya menjadi terhambat karena sumber pembiayaan program pembangunan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan.

Melihat situasi dan kondisi yang makin sulit di sektor pendapatan asli daerah, pemerintah daerah memanfaatkan salah satu peluang yang dimiliki oleh kota Batam yakni memanfaatkan letak geografis yang sangat strategis dimana menjadi pintu masuk perdagangan senusantara, potensi tersebut terus dikomunikasikan kepada pemerintah pusat agar proyek-proyek strategis nasional dapat ditempatkan di kota Batam, sehingga kota Batam dari tahun 2020 mendapat proyek-proyek strategis dari pemerintah pusat dari hal tersebut dapat dilihat pemasukan pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus maupun dana hibah terus mengalami peningkatan.

Dari sektor pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan-pendapatan lainnya seperti dana bagi hasil. Kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan investasi dan kemampuan menarik perhatian pemerintah pusat menjadi hal yang sangat penting dalam mengisi kas keuangan daerah. Daya tarik kota Batam sebagai daerah yang berhadapan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia serta

menjadi jalur perdagangan internasional merupakan kelebihan yang dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menarik simpati pemerintah pusat agar dana alokasi khusus dan dana-dana lainnya dapat dialokasikan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah harus mampu membuat langkah strategis, baik dari segi perencanaan, implementasi hingga pada proses evaluasi dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah dan hal yang perlu diperhatikan secara serius adalah pemasukan dan pengeluaran serta dampak baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan pengalokasian anggaran tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal prioritas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, karena hal ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau publik kepada pemerintah daerah, hal lain menjadi perhatian serius adalah efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Pada prinsipnya tata kelola keuangan pemerintah harus mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi anggaran ini merupakan tuntutan perkembangan zaman yakni kemajuan teknologi informasi dan kondisi masyarakat yang semakin sadar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan

yang bersih (*clean government*) serta menerapkan nilai-nilai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dari segi pelayanan publik, hal ini juga sangat perlu diperhatikan agar ada kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Kecenderungan masyarakat ataupun pengusaha sering mengeluhkan kurang tanggapnya birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan secara prima. Sulitnya masyarakat mendapatkan pelayanan secara prima baik dalam pengurusan dokumen usaha maupun pembayaran pajak atau retribusi memunculkan stigma negatif dikalangan pengusaha dan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel dari hulu ke hilir.

Pemerintah kota Batam dalam menyusun strategi dan memproyeksikan pendapatan asli daerah untuk tidak terlalu berambisi dalam arti tidak memaksakan segala sesuatu hal untuk bisa dijadikan sebagai pendapatan daerah, pemerintah daerah harus bisa melihat kondisi masyarakat dan kelanjutan usaha masyarakat ataupun pihak swasta, dalam memproyeksikan anggaran harus lebih moderat karena dikhawatirkan perekonomian yang belum pulih akan semakin menterdistori kebijakan pemerintah kota Batam dalam meningkatkan pendapatan disektor pajak dan retribusi daerah serta Pendapan Asli Daerah lain-lain yang sah.

Hal yang penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Batam adalah melakukan pembenahan terhadap tata kelola keuangan daerah. Perbaikan dan peningkatan sistem tata kelola keuangan dan prosedur, inovasi, pelayanan serta penggunaan teknologi tepat guna dan terbarukan untuk menunjang pelayanan penerimaan negara selain itu pemerintah daerah membuat kebijakan untuk menekan potensi kebocoran anggaran dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah.

Dalam menetapkan kebijakan pendapatan daerah pemerintah kota Batam dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat khususnya kementerian keuangan sebaiknya satu arah atau satu pintu dalam melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pendapatan negara dalam APBN yang dikelola oleh pemerintah pusat. Seperti menetapkan kebijakan pembebasan atau keringanan pajak dan retribusi daerah bagi sektor yang sangat terdampak pandemic COVID-19 serta berbagai bentuk keringanan atau kemudahan kepada dunia usaha dan masyarakat yang menjadi obyek atau subyek pendapatan asli daerah. Hal ini perlu ditekankan agar kondisi dunia usaha semakin membaik sehingga kedepannya, stabilitas perekonomian dunia usaha semakin sehat hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah daerah kota Batam.

Pemerintah Kota Batam dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah di

masa COVID-19 adalah tetap dan lebih fokus pada sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, hal tersebut perlu dijaga agar keuangan pemerintah daerah kota Batam tetap stabil dan aman, namun hal ini beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota Batam adalah menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, kemudahan pelayan dan menjaga daerah agar tetap aman terkendali serta kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dengan baik dari segi perencanaan, pengalokasian, transparansi, akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi anggaran. Dana insentif daerah yang diterima oleh pemerintah kota Batam terus dijaga agar terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan perencanaan yang mapan, jelas dan terukur.

Dana insentif daerah yang diatur oleh kementerian keuangan menjadi instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, untuk mendorong pemerintah kota Batam agar lebih maju, kreatif, berprestasi, berkembang dalam hal inovatisi serta efisien dalam pengelolaan anggaran penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di kota Batam. Dimana pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disalurkan kepada daerah-daerah tertentu dengan kriteria yang diatur dalam undang-undang.

Dana insentif merupakan bentuk penghargaan dan motivasi untuk pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat atas kualitas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinilai baik dengan berbagai ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun dalam peraturan pemerintah, seperti kualitas pelayanan publik semakin membaik dan prima, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta penyelenggaraan pemerintahan stabil dan orientasi program yang mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Kota Batam dalam merencanakan program dan merumuskan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai macam sektor baik pihak swasta maupun masyarakat agar arah pembangunan lebih jelas. Kebijakan dalam rancangan pembangunan daerah harus dirumuskan dengan baik dan menyelaraskan program pembangunan nasional yang akan nantinya dituangkan dalam RPJMD tahun 2021 hingga 2026, dalam rencana tersebut menyatakan bahwa program dana insentif daerah dari pemerintah pusat akan didukung dengan program yang berkualitas seperti proyek-proyek strategis nasional. Keberuntungan pemerintah kota Batam dalam menarik dana insentif dari pemerintah pusat adalah letak wilayah yang sangat strategis, tata kelola pemerintahan, serta perencanaan

pembangunan sebelumnya sangat mendukung, sehingga dana insentif daerah menjadi salah satu sumber pendapatan kreatif daerah harus dipertahankan dan diperjuangkan termasuk juga pemanfaatan secara profesional berbagai aset daerah khususnya di Kota Batam.

KESIMPULAN

Pendapatan Kota Batam mampu bertahan dan meningkatkan pendapatan daerah dalam situasi krisis ekonomi ditengah COVID-19 melanda. Kemampuan bertahan dan peningkatan pendapatan tersebut tidak berarti Kota Batam tidak terdampak. Komposisi APBD Kota Batam di PAD mengalami penurunan karena di sektor unggulan Kota Batam seperti pariwisata dan turunannya menjadi sektor yang cukup terdampak.

Salah satu faktor pendapatan kota batam mengalami kenaikan di masa COVID-19 adalah disektor industri perdagangan, utamanya industri manufaktur masih stabil. Hal ini yang mendorong pendapatan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah tetap mengalami kenaikan atau penyumbang pendapatan daerah terbanyak di tahun 2020. Utamanya dana bagi hasil pajak yang mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah mengalami peningkatan di masa COVID-19 hal ini disebabkan karena, selain dana bagi hasil pajak baik dari

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan dana insentif dari pemerintah pusat dan dana perimbangan cukup besar. Dana tersebut cukup banyak disalurkan kepada pemerintah Kota Batam.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah ditengah COVID-19 adalah memperbaiki mutu pelayanan publik, kemampuan menyelaskan program pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan dan menjual potensi daerah kepada pemerintah pusat dan investor sehingga program strategis nasional dapat ditempatkan di kota Batam, hal ini sangat mendorong pemasukan pemerintah daerah terkait dengan dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Beberapa saran praktis yang dapat dilakukan antara lain: mempertahankan kepercayaan Pemerintah Pusat melalui pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; merancang program pembangunan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kondisi ekonomi dan sosial saat ini, termasuk berkontribusi pada program pembangunan nasional; menjaga stabilitas sektor industri dan perdagangan; pemulihan sektor pariwisata; diversifikasi sumber pendapatan; dan kolaborasi antar pemerintah.

REFERENSI

- Atmaja, S. (2020). *Analisa Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta*. Tugas Akhir, Repository BSI, 13–17.
- Anggraini R., & Janrosl VSE. (2023). Analisis Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 389-395.
- BP Batam. Industri Unggulan, BP Batam. diakses dari <https://bpbatam.go.id/investasi/pejuang-investasi/keunggulan-investasi/industri-unggulan/>
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *AkMen*, 17(April), 90–98.
- Cutler, D. M., & Summers, L. H. (2020). The COVID-19 pandemic and the \$16 trillion virus. *Jama*, 324(15), 1495-1496.
- Claxton, G., Rae, M., Damico, A., Young, G., Kurani, N., & Whitmore, H. (2021). Health Benefits In 2021: Employer Programs Evolving In Response To The COVID-19 Pandemic: Study examines employer-sponsored health benefits programs evolving in response to the COVID-19 pandemic. *Health Affairs*, 40(12), 1961-1971.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *EQUITY*, 22(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146–153.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hartono, J. 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknis Analisis Data*. Yogyakarta: Andi
- Maher, C. S., Hoang, T., & Hindery, A. (2020). Fiscal Responses to COVID-19: Evidence from Local Governments and Nonprofits. *Public Administration Review*, 80(4), 644-650. <https://doi.org/10.1111/puar.13238>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Paramitha, A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah COVID-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 94–104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>
- Prasety, MAW., Simorangkir C. dan Pribadi DMA. (2022). Perdagangan Internasional Indonesia: Sebuah Komparasi di Masa Pandemi COVID-19 EXERO: *Journal of Research in Business and Economics*. Vol. 05, No. 01, Mei 2022 <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/exero>. 83-111
- Ramadhan, A., Prayoga D., Simbolon R. & Mukti, LA. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Sektor Perdagangan Membuat Penjualan & Profitabilitas Perusahaan Menurun Sehingga Arus Kas Kepemilikan (Saham) Perusahaan Juga Menurun. *Jurnal Kompetitif Bisnis Edisi COVID-19*, 1(1), Agustus 2020, pp. 71-78.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah dimasa Pandemi COVID-19 (Study kasus pada pemerintah daerah provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273-290.
- Sood, N., & Murray, C. J. (2020). Estimation of Excess Deaths Associated With the COVID-19 Pandemic in the United States, March to May 2020. *JAMA Internal Medicine*, 180(10), 1336-1344.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta
- Suliswanto, M. S. W. (2020). Dampak Ekonomi dari Virus Corona. Bhirawa, p. 4. Retrieved from <https://www.harianbhirawa.co.id/dampak-ekonomi-dari-virus-corona/>
- Syamsuddin, S. (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal of Business Administration (JBA)*, 1(1), 5. <https://doi.org/10.31963/jba.v1i1.2676>
- Triyawan, A., & Fendayanti, Z. E. U. (2021, April). Dampak pandemi covid-19 terhadap keberlangsungan perusahaan jasa konstruksi. In *forum ekonomi* (Vol. 23, No. 2, pp. 223-230).
- Wuryandani, D. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dan solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12, 19-24.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>
- Yurianto, Y. (2020). Estimasi Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Pra-Pandemic Covid -19. *Sosio E-Kons*, 12(3), 230. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i3.7568>